PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

Serang, 13 Mei 2024

Nomor : B-100.3.3.1/1204/Huk/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan

Yth. Daftar Terlampir
di
Serang

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan Tahun Anggaran 2024, Biro Hukum akan melaksanakan Rapat Pembahasan yang akan diselenggarakan pada :

Hari	:	Kamis, 16 Mei 2024
Waktu	:	09.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Biro Hukum Setda Prov.Banten
Acara	:	Rapat Pembahasan dan Legal Drafting Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Banten.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Asisten Pemerintahan Umum
Dan Kesejahteraan Rakyat,

Dr. Komarudin, M.A.P.
Pembina Utama Madya
NIP. 197007211991011002

DAFTAR UNDANGAN

1. Kepala Bapeda Provinsi Banten
2. Kepala Kesbangpol Pertanian Provimsi Banten
3. Kepala Disnaker Provinsi Banten
4. Kepala DP3aKKB Provinsi Banten
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten
7. Kepala Bagian Perundang-undangan Provinsi Banten
8. Ani Kurniasih, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten)
9. Nawawi, S. Kom (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten).
10. Didi Sohidi Tohir, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
11. Agus Prihatna, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
12. Dewi Yanti Arhentine, S.Sos. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
13. Sri Yulianti, S.H. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
14. Reza Thareeq Akbar, S.H. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
15. Rahadyanto,S.Kom,M.Si (Kepala Bidang Hukum Kanwil Hukum dan HAM Banten)

JADWAL PELAKSANAAN RAPAT PEMBAHASAN

NO	USULAN RANCANGAN	NARASUMBER	OPD PENGUSUL	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Program Prioitas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024	1. Kepala Kanwil Hukum dan HAM Banten 2. Inspektorat Daerah Provinsi Banten	Bappeda Prov.Banten	Kamis, 16 Mei 2024 Jam 09.00-selesai Session I Ruang Rapat Biro Hukum
2.	Daftar Wilayah Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tahun Ajaran 2024/2025		Dinas Pendidikan Provinsi Banten	Kamis, 16 Mei 2024 Jam 09.30-selesai Session II Ruang Rapat Biro Hukum
3.	Tim Terkoordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Banten Periode Tahun 2024-2025		Disnaker Prov.Banten	Kamis, 16 Mei 2024 Jam 10.00-selesai Session III Ruang Rapat Biro Hukum
4.	Kepengurusan Forum Generasi Berencana Indonesia Banten Periode 2024-2026		DP3AKKB Provinsi Banten	Kamis, 16 Mei 2024 Jam 10.30-selesai Session IV Ruang Rapat Biro Hukum
5.	Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Banten		Kesbangpol Prov.Banten	Kamis, 16 Mei 2024 Jam 11.00-selesai Session V Ruang Rapat Biro Hukum

DAFTAR HADIR RAPAT PEMBAHASAN
LEGAL DRAFTING FASILITASI PENYUSUNAN RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hari/ Tanggal : Kamis, 16 Mei 2024
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi Banten
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan

NO	Nama	Instansi	L/P	Tanda tangan
1	2	3	4	5
1	Hadi Prawoto	Plt. Kabo Hukum		1
2	A. Fajrullah	Biro Hukum	L	2
3	Bantiar Awang Z	Inspektorat	L	3
4	Ahmad Afifi	Dindikbud	L	4
5	Solihin	Dindikbud	L	5
6	Sugeng Haryadi	Bappeda	L	6
7	Arief R	Bappeda	L	7
8	Rahman Rangga	Kanwil Kemenkumham	L	8
9	Erminiwati	DP3AKKB	P	9
10	Sofa Rauanda Shofa	BIRO HUKUM	P	10
11	Sri Yulianti	Biro Hukum		11
12	Reza. T. A.	Biro Hukum		12
13	ASEP SUNANDAR	BIRO HUKUM		13
14	Agus Rihatna	Biro Hukum	L	14
15	NAWAWI	BPAD BANTEN	L	15
16	Fipin RA	Disnakertrans	P	16
17	Dewi Yanti. A.	Biro Hukum	P	17
18	MIKO	BIRO HUKUM	P	18

19	Adang Abdurahman	Direktur Banten		19
20	Dira Rizki A	Kesbangpol Banten		20
21	Ade Ing.	Kesbangpol		21
22	TB. Helmi	Kesbangpol Banten		22

PPTK

AKHMAD SYAEFULLAH,SH

NIP. 19780511 200112 1 002

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

NOTULEN

Rapat	:	Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Gubernur tentang: 1. Rancangan Keputusan Gubernur tentang DAftar Wilayah Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tahun Ajaran 2024/2025; 2. Rancangan Keputusan Gubernur tentang Program Prioritas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024; 3. Rancangan Keputusan Gubernur tentang Tim Terkoordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Banten Periode Tahun 2024-2025; 4. Rancangan Keputusan Gubernur tentang Kepengurusan Forum Generasi Berencana Indonesia Banten Periode 2024-2025 5. Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Banten.
Hari/Tanggal	:	Kamis, 16 Mei 2024
Tempat	:	Ruang Rapat Biro Hukum
Waktu Rapat	:	09.00 WIB – Selesai.
Acara	:	1. Pembukaan 2. Pembahasan. 3. Kesimpulan.
Peserta Rapat	:	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten; 2. DP3AKKB; 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten; 4. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten; 5. Kesbangpol Provinsi Banten; 6. Biro Hukum; 7. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten.
1. Pembukaan	:	Rapat dibuka oleh Plt. Kepala Biro Hukum Provinsi Banten.
1. Pembahasan	:	1. Pada hari ini akan ada 5 (lima) Rancangan Keputusan Gubernur yang sudah dikaji dan ditelaah sebelumnya oleh Tim Kerja Biro Hukum. 2. Mudah-mudahan yang datang mewakili pada hari ini dapat sama-sama untuk memperbaiki. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten 1. SK Zonasi ini berdasarakan beberapa pertimbangan, termasuk masukan dari Kementerian terhadap Evaluasi PPDB Tahun sebelumnya. 2. Untuk Banten zonasinya per satu provinsi, artinya dalam wilayah provinsi bisa masuk ke Sekolah, akan

tetapi masukan dari Itjen Kemendagri agar Provinsi Banten meningkatkan zonasi ini.

3. Untuk Provinsi Banten, Banten baru bisa zonasi level kecamatan yang harapannya sudah membatasi dari wilayah jauh tidak bisa masuk.
4. Zonasi Wilayah Kecamatan dibagi dalam, kecamatan dalam kecamatan sama, kecamatan di kota sama, dan kecamatan antar wilayah kabupaten/kota.
5. Ukuran diterima atau tidaknya masih menggunakan poin to poin.
6. Persyaratan Karti Keluarga tahun sebelumnya dapat hanya anak saja yang berpindah kartu keluarga, akan tetapi untuk tahun ini perpindahan kartu keluarga harus dilakukan semua anggota keluarga, baru hal ini akan dianggap sesuai persyaratan.
7. PPDB masih ada 4 jalur. Zonasi per kecamatan, poin to poin, kartu keluarga dengan titik sekolah tersebut. Kemudian jalur afirmasi

BIRO HUKUM

1. Sekolah yang ada di daftar ini apakah semua sekolah yang ada di provinsi Banten atau hanya yang dipilih saja?
2. Apakah efektif jika dilakukan dengan pemetaan yang seperti ini?
3. Sekjen Kemendikbud mengatur untuk diatur dengan Keputusan Kepala Daerah? karena pedomannya dikeluarkan oleh Sekjen bukan Peraturan.
4. Apa tidak bisa diatur di dalam Juknis?
5. Data agar dilengkapi, kemudian surat temuan bisa menjadi memperhatikan.

Tanggapan

1. Daftar zonasi ini adalah semua SMA Negeri di Provinsi Banten
2. Kelebih zonasi per kecamatan, jika ada yang daftar jauh akan dibatasi.
3. Ada di Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 20.

KEMENKUMHAM

1. Dalam Permendikbud 1 Tahun 2021 Pasal 17 bahwa jalur zonasi adalah penetapan zonasi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, pemaknaannya dapat dimaknai ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
2. Pasal 20 delegasi tidak murni tetapi atribusi.

BIRO HUKUM

1. Ada arahan dari Surat Sekjen Kemendikbud, yang mengarakan kepada Kepala Dinas Pendidikan agar menyelesaikan petunjuk Teknis.

INSPEKTORAT

1. Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan pasti sudah dilaksanakan.
2. Latar belakang disusunnya Keputusan Gubernur ini seperti apa?

BAPPEDA

Program Piroritas Daerah yang sudah ada di DPA kegiatannya.

DP3AKKB

1. Usulan Nama sudah berdasarkan BKKBN yang sudah hasil dari seleksi dan sudah sesuai dengan ketentuannya.
2. Kita selelau melibatkan Forum ini di kegiatan DP3AKKB.

BIRO HUKUM

1. Gubernur akan menanyakan mengenai proses seleksinya dan bagaimana dengan Laporan periode tahun sebelumnya. Jika ini sudah sesuai seleksi mohon di lampirkan hasil seleksi dan penilaiannya.
2. Anggarannya dari mana? Karena pembiayaan dari APBN dan APBD.
3. Sebetulnya tidak amanat langsung untuk membentuk Forum.
4. Agar menghilangkan periode nya. Lebih baik di ganti menjadi Tahun saja.
5. Agar tidak usah menyebitkan Pasal langsung ke Tahun saja.
6. Menghilangkan jabatan "Pj".

DINAS TENAGA KERJA PROVINSI BANTEN

1. Disnaker ditagih oleh Kemendagri di pertengahan tahun 2023.
2. Menyusun Telaaah Staf ke Sekda di Oktober Tahun 2023 dan di bulan Januari Tahun 2024 menyusun lagi. Dan pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang lintas Perangkat Daerah.
3. Mohon arahan mengenai tugas fungsi dan juga perangkat Daerah karena kami juga masih belum mendalami, di dalam Tim dari Disnaker merupakan anggota saja.

BIRO HUKUM

1. Ada dasar hukumnya di Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 pada Pasal 22 ayat (2).
2. Agar tugas disesuaikan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koorrdinasi Daerah Revitaslisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

KESBANGPOL

1. SK Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organiasi Kemasyarakatan di Provinsi Banten sudah lewat dari waktunya
2. Karena ini sifatnya memperpanjang, yang diubah sekretariat.
3. KODAM menjadi KOREM karena dirasa terlalu jauh.
4. Tim ini di biayai oleh APBD.
5. Pembinaan lebih kepada Ormas

BIRO HUKUM

1. Laporan dari Tim yang lalu bagaimana, kemudian fungsi dari Tim ini seperti apa apakah efektif?

Kesimpulan : Agar Draft Keputusan Gubernur yang sudah dilakukan pembahasan, di lakukan perbaikan sesuai dengan hasil Rapat.

Notulen Rapat,

Sri Yulianti, S.H.
Penata Tk.I /III d
NIP. 19860702 200912 2 003





Rapat Legal Drafting , Kamis 16 Mei 2024 Pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Biro Hukum